



LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH SEMESTER 1 TAHUN 2024

Divisi Pemasyarakatan



Endang Lintang Hardiman
Kepala Divisi Pemasyarakatan Gorontalo

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Tahun 2024.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Gorontalo, 30 Juni 2024
Kepala Divisi Pemasyarakatan,



Endang Lintang Hardiman SH.,MH
NIP. 196706201993031001



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSLUSIF	3
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	8
A. Umum	8
B. Visi dan Misi	8
C. Tugas dan Fungsi	9
D. Organisasi dan Personalia	9
E. Jumlah Satuan Kerja	12
F. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi	12
1.2 Dasar Hukum	12
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Pengertian dan Pengukuran Kinerja	13
1.5 Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.2 Divisi Pemasarakatan	16
A. Perencanaan Kinerja	17
B. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.2 Divisi Pemasarakatan	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	96
C. Capaian Kinerja Lainnya	94
D. Kegiatan Prioritas Nasional	101
BAB IV PENUTUP	102
4.1 Kesimpulan	102
4.2 Saran	103
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Divisi Pemasyarakatan Tahun 2024 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Di dalamnya memuat tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2024 dengan hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja

Triwulan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
I	INDEKS PENEGAKAN HUKUM PEMASYARAKATAN DI WILAYAH	3.88	3.6	107.724960
II		3.87	3.6	107.550774
III			3.6	
IV			3.6	

Nilai Indikator tersebut ini diukur melalui 8 dimensi ukuran yang dapat dilihat pada link :

<https://drive.google.com/drive/folders/13vG4QATH4OJdV9A4Jr6Ydwug3fFBmh20?usp=sharing>

Setelah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka merealisasikan rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun 2024, Divisi Pemasyarakatan berhasil mencapai sejumlah hasil yang signifikan dalam mencapai indeks Penegakan Hukum di wilayah. Capaian ini tercermin dalam berbagai indikator kinerja yang telah berhasil dipenuhi. Terobosan dalam Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Pengamanan dan Intelijen, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, dan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

B. Capaian Realisasi Anggaran dan Perbandingan Anggaran :

Pada Tahun 2024 Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo mendapatkan dukungan anggaran sejumlah Rp. 609,616,000,- (Enam ratus sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah) hingga 30 Juni telah berhasil merealisasikan sejumlah Rp. 359,025.694,- (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat) atau sebesar 60.27 % dengan rincian dan perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2024

KRO/RO	Pagu	Realisasi	Sisa
Sosialisasi dan Diseminasi	145,020,000	56,234,000	88,786,000

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Base Line)	237,665,000	139,205,794	98,459,206
Operasi Bidang Keamanan	226,931,000	139,205,794	98,459,206
	609,616,000	359,025,694	250,590,306

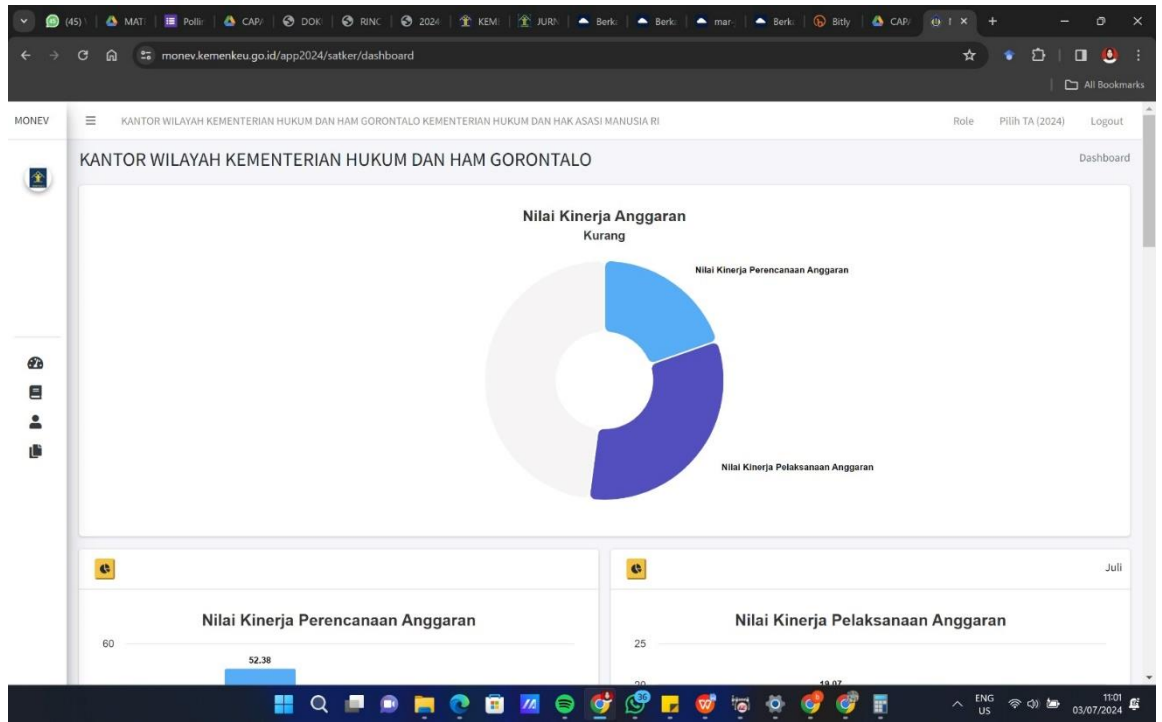
Realisasi Anggaran Tahun 2023

KRO/RO	Pagu	Realisasi	Sisa
Koordinasi	209,112,000	208,934,840	177,160
Sosialisasi dan Diseminasi	121,683,000	121,600,290	82,710
Operasi Bidang Keamanan	243,963,000	243,641,910	321,090
	574,758,000	574,177,040	580,960

C. Nilai SMART (Sistim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan)

Capaian kinerja anggaran merupakan perpaduan antara nilai dari SMART DJA sebesar 60 % dan pencapaian daripada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 40 %. Capaian Kinerja Ini belum dapat dilakukan pengukuran disebabkan belum adanya nilai IKPA dari seluruh satuan kerja yang ada dikantor wilayah, sehingga data capaian kinerja keuangan akan di sampaikan selanjutnya setelah data tersebut tersedia. Namun berdasarkan pemantauan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA rata-rata capaian masih rendah sebagaimana pada tabel berikut :

Capture Nilai Smart DJA



Caputure Nilai IKPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | JUNI

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/ KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	050	013	649012	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00			100.00					

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja Divisi Pemasarakatan. Laporan Kinerja Divisi Pemasarakatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan kebijakan pimpinan dalam perumusan keputusan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal di masa mendatang.



Divisi
Pemasyarakatan



Kementerian Hukum dan
Republik Indonesia
Kantor Wilayah Gorontalo

HARI BAKTI PEMASYARAKATAN KE-
"PEMASYARAKATAN PASTI BERDAMPAK"



BAB I PENDAHULUAN

BerAKHLAK
Berkeadilan, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

**# bangga
melayani
bangsa**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Divisi Pemasyarakatan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

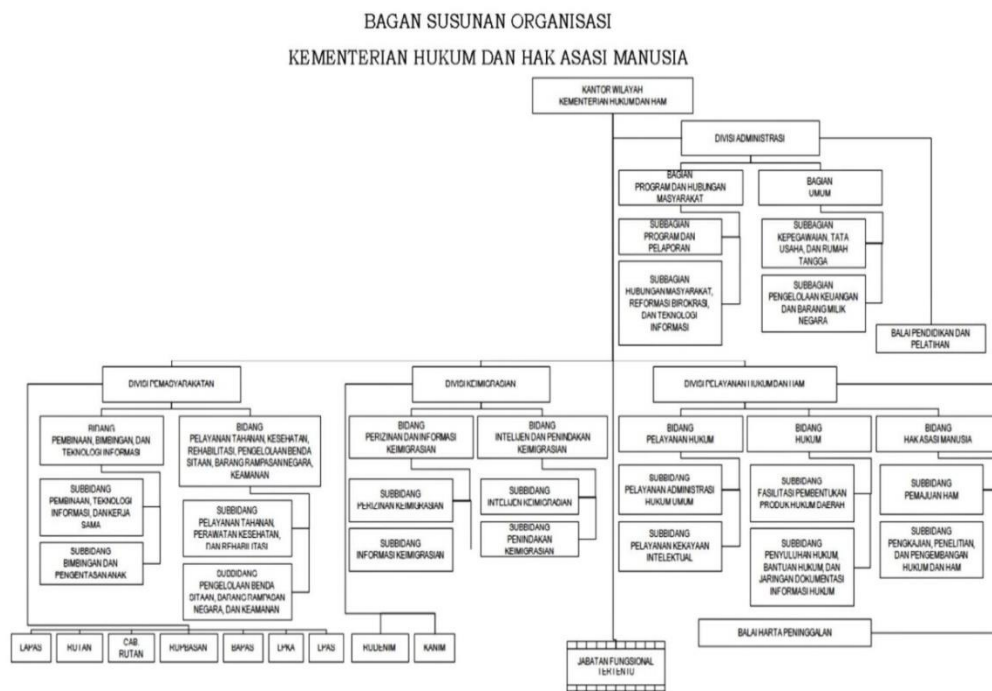
1. Tugas : “Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah.”
2. Fungsi :
 - a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
 - b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana

dan latihan kerja produksi, bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;

- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan; dan
- d. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki semangat kerja tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan terdapat 16 pegawai

- b. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

4. Jumlah Satuan Kerja

Terdapat 7 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, sebagai berikut:

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALAMAT
1	LAPAS KELAS IIA GORONTALO	Jl. Jenderal Katamso, Siendeng Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo
2	LAPAS KELAS IIB BOALEMO	Piloliyanga, Kec. Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo
3	LAPAS KELAS III POHUWATO	Balayo, Kec. Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo
4	LPKA GORONTALO	Jl. Jend. Sudirman, Limba U Dua, Kota Sel., Kota Gorontalo, Gorontalo
5	BAPAS KELAS II GORONTALO	Toto Sel., Kec. Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
6	RUPBASAN KELAS I GORONTALO	Pentadio Tim., Kec. Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
7	LAPAS PEREMPUAN GORONTALO	Hutuo, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo



C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo menyusun Laporan Kinerja

TA. 2024 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi Rencana Aksi dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.

Kontribusi Pemasyarakatan dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dalam bentuk: (i) narapidana, tahanan, anak, dan klien Pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia; (ii) keamanan dan ketertiban di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT Pas) terjaga; (iii) narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia; (iv) dan hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan (Basan) dan/atau barang rampasan (Baran) terlindungi yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo selama periode tahun 2023, terdapat isu strategis/permasalahan pada Pemasyarakatan yang dapat menghambat capaian kinerja yakni :

1. Belum terpahaminya konsep dan tugas dan fungsi pemasyarakatan pada lembaga penegak hukum lainnya, sehingga memberikan kecenderungan atas ketidak optimalan bekerjanya sistem pemasyarakatan dalam tata peradilan pidana.

2. Kurangnya pemahaman petugas masyarakatan terkait fungsi intelijen sehingga belum mampu mendeteksi dini terhadap pelaksanaan tugas yang berdampak pada penyelenggaraan masyarakatan tidak berjalan secara optimal.
3. UPT Masyarakatan dalam mencapai renaksi aksi Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk Lapas Produktif melalui *E-Katalog* terdapat kendala, terdapat UPT Masyarakatan belum memiliki Koperasi berbadan hukum, Kesulitan dalam memasarkan produk kerajinan tangan (handycraft) dan Kesulitan memasarkan produk makanan/minuman.

F. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Divisi Masyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Tahun 2024 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Kata Pengantar : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Divisi Masyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo Tahun 2024

Ikhtisar Eksekutif : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Divisi Masyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Divisi Masyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja, rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023 divisi Masyarakatan, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan serta capaian kinerja lainnya yang telah dilaksanakan Divisi Masyarakatan pada tahun 2024. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian

kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2023 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.



DIVISI
PEMASYARAKATAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BerAKHLAK
BERAKHLAK BERKUALITAS BERKEADILAN
BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

**#bangga
melayani
bangsa**



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s/d 2024.

Perencanaan strategis yang tertuang meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Strategi. Substansi yang terdapat di dalam Renstra juga dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Seluruh dokumen perencanaan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menyusun LKjIP Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.

1. Visi Misi dan Tujuan

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Misi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**VISI DAN MISI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2020-2024**

VISI

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang **Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas** dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong””

MISI

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, bermartabat dan terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020- 2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- 3) Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- 4) Terlindunginya hak asasi manusia;
- 5) Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- 6) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban diseluruh Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara;
- 7) Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Divisi Pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Divisi Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis Divisi Pemasyarakatan dapat dilihat dalam table berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3.6 Indeks

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai Divisi yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah, Divisi Pemasyarakatan menjalankan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah. Sesuai Tugas dan Fungsi yang diemban Divisi Pemasyarakatan dari Perjanjian Kinerja Sampai Daftar Isian Pelaksanaan Petikan (DIPA) Nomor DIPA-013.05.2.649012/2023, fokus utama sasaran kegiatan Divisi Pemasyarakatan adalah meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di Wilayah. Dalam mencapai sasaran kegiatan tersebut maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta rencana kegiatan Divisi Pemasyarakatan TA. 2024, sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3.6 Indeks

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran dan Indikator Kinerja tersebut, Kantor Wilayah melalui Program Pelayanan dan Penegakkan Hukum yang diampu oleh Divisi Pemasyarakatan diberikan anggaran sebesar Rp.609.616.000,- (Enam ratus sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah).



DIVISI
PEMASYARAKATAN



BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi berdasarkan rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai oleh Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo adalah sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi perjanjian kinerja Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo tahun 2024 berdasarkan pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output).

- **Sasaran Kegiatan** “Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah”

1. Indeks penegakan hukum pemsarakatan di wilayah

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemsarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

1. Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasarakatan;
2. Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
3. Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
4. Pengamanan dan Intelijen;
5. Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
6. Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan

Indikator ini diukur melalui 8 dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

No	Dimensi Penilaian	Bobot	Target 2024
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	3.6
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%	
3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%	
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%	
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat di wilayah	12,5%	
6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%	
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%	
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Masyarakat di wilayah	12,5%	
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat		100 %	

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

a. Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 :

No	Dimensi Penilaian	Target		Capaian	
		Bobot	Indeks	Bobot	Indeks
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	3.6	96.7 %	3.86
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%		83.3 %	3.3
3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%		95.7 %	3.86
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%		100%	3.6
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat di wilayah	12,5%		100%	3.6
6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%		100 %	3.6
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%		100%	3.6
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Masyarakat di wilayah	12,5%		100 %	3.6
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat		100 %		96.9 %	3.88

b. Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 :

No	Dimensi Penilaian	Target		Capaian	
		Bobot	Indeks	Bobot	Indeks
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	3.6	96.7 %	3.86
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%		83.3 %	3.3

3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%		95.7 %	3.86
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%		100%	3.6
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat di wilayah	12,5%		100%	3.6
6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%		100 %	3.6
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%		100%	3.6
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Masyarakat di wilayah	12,5%		100 %	3.6
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat		100 %		96.9 %	3.88

Capaian Kinerja Pertriwulan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Triwulan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
I	INDEKS PENEGAKAN HUKUM PEMASYARAKATAN DI WILAYAH	3.88	3.6	107.724960
II		3.87	3.6	107.550774
III			3.6	
IV			3.6	

Formasi / Cara Perhitungan

- Konversi hasil capaian indikator dimensi penilaian ke dalam skala 4 dengan rumus: (Capaian indikator dimensi penilaian x 4)
- Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian saat ini bobot untuk setiap dimensi penilaian dianggap sama.
- Hitung indeks penegakan hukum masyarakat dengan rumus: $\{(\text{dimensi penilaian 1} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 2} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 3} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 4} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 5} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 6} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 7} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 8} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 9} \times \text{bobot}) + (\text{dimensi penilaian 10} \times \text{bobot})\}$

Sebagai bentuk Akuntabilitas penyusunan laporan, berikut adalah link data dukung Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Divisi Pemasyarakatan Gorontalo dapat dilihat matriks dan data dukung pada link di bawah ini :

<https://drive.google.com/drive/folders/13vG4QATH4OJdV9A4Jr6Ydwug3fFBmh20?usp=sharing>

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo mendapatkan dukungan anggaran sejumlah Rp. 609,616,000,- (Enam ratus sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah) hingga 30 Juni telah berhasil merealisasikan sejumlah Rp. 359,025.694- (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat) atau sebesar 60.27 % dengan rincian dan perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2024

KRO/RO	Pagu	Realisasi	Sisa
Sosialisasi dan Diseminasi	145,020,000	56,234,000	88,786,000
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Base Line)	237,665,000	139,205,794	98,459,206
Operasi Bidang Keamanan	226,931,000	139,205,794	98,459,206
	609,616,000	359,025,694	250,590,306

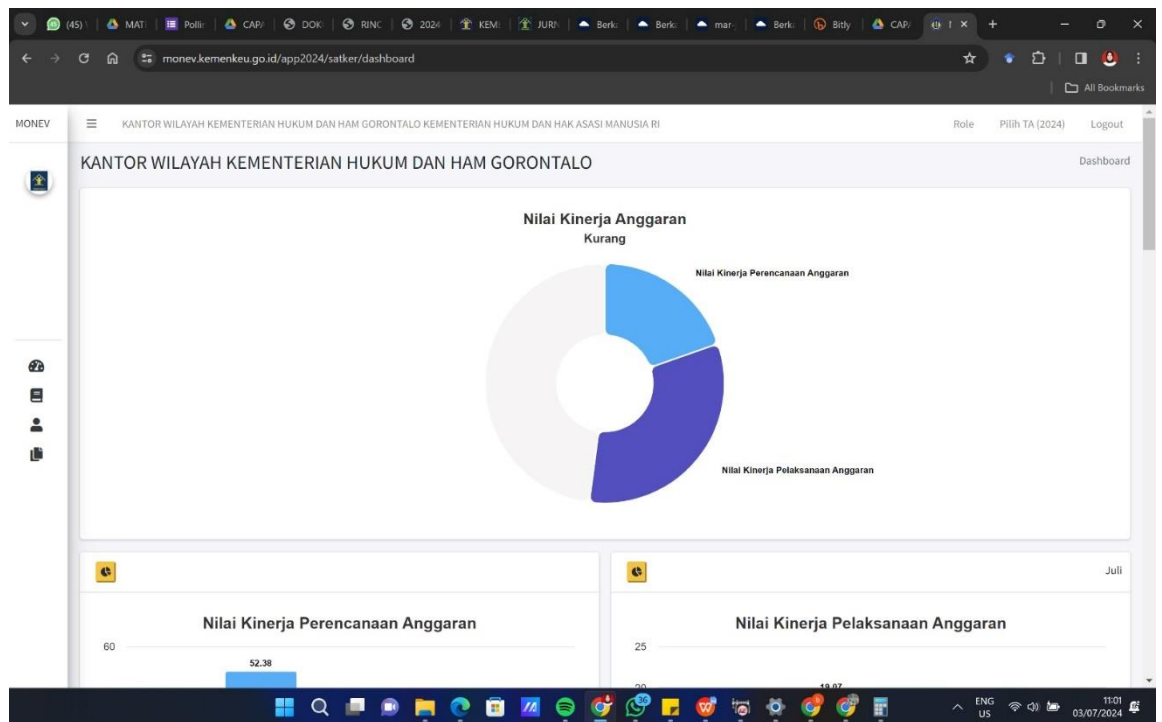
Realisasi Anggaran Tahun 2023

KRO/RO	Pagu	Realisasi	Sisa
Koordinasi	209,112,000	208,934,840	177,160
Sosialisasi dan Diseminasi	121,683,000	121,600,290	82,710
Operasi Bidang Keamanan	243,963,000	243,641,910	321,090
	574,758,000	574,177,040	580,960

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian kinerja anggaran merupakan perpaduan antara nilai dari SMART DJA sebesar 60 % dan pencapaian daripada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 40 %. Dalam aplikasi monev smart kinerja anggaran pada website <https://smart.kemenkeu.go.id/> bahwa efisiensi anggaran Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Capture Nilai Smart Dja



Capture Nilai IKPA

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/ KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAJIAN TAGIHAN						PENGLOLAAN LP DAN TUP
1	050	013	649012	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00			100.00					

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Capaian E-PERFORMANCE

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Berdasarkan Data Perjanjian Kinerja, Kantor Wilayah Gorontalo memiliki 1 Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian Tahun 2024 sebagai berikut :

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2024
DIVISI PEMAYARAKATAN GORONTALO

NO	SASARAN	STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CASAKOING		TARGET				REALISASI		LAMPIRAN	CATATAN MONITORING	BOBOT	RSC SCORE(%)
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN					
1.	Ternyata	Perbaikan	Indeks Perbaikan Mula Pemasyarakatan di Wilayah			3.6 Indeks Tahunan IV	T101	3.6	Indeks	3.88	100			0	0

2. Capaian Rencana Aksi Percepatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia, Divisi Pemasyarakatan Gorontalo melaksanakan 3 Rencana Aksi Percepatan Kinerja dan telah mengunggah seluruh data dukung kedalam aplikasi Mycloud dengan Capaian sebagai berikut :

1. Rencana Aksi 1 : Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan

No	Bulan	Kegiatan Yang dilaksanakan	Anggaran
1.	Januari dan Februari	1. Mengirimkan permintaan data Jumlah kebutuhan tenaga Pembantu PK (Pembimbing Kemasyarakatan) dan APK (Asisten Pembimbing Kemasyarakatan) kepada UPT Pemasyarakatan dalam hal Ini Lapas dan LPKA di Wilayah Gorontalo;	Menggunakan anggaran Monitoring dan Evaluasi sebesar Rp. 5.620.600

		2. Memetakan Kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan mengirimkan ke Ditjenpas.	
2.	Maret	<p>1. Mengirimkan Surat kepada 5 UPT yang tersebar di Wilayah Gorontalo perihal Undang an Diklat Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan melalui Bimbingan Teknis bagi Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada LPKA, Lapas dan Rutan yang di selenggarakan oleh Direktur Pembimbing Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan melalui <i>zoom meeting</i>.</p> <p>2. Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait Mekanisme dan Sistem Kerja bagi Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2024</p>	-
	April	3. Melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan kepada UPT terkait Pelaksanaan tugas Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) yang ada di UPT dalam hal ini pelaksanaan litmas oleh PPK.	Menggunakan anggaran Monitoring dan Evaluasi sebesar Rp. 5.620.600
	Mei	4. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Hasil Kajian dan Urgensi Pelaksanaan Litmas Online yang dilaksanakan oleh Direktur Pembimbing Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan melalui Virtual Zoom, Hari Jumat, Tanggal 31 Mei 2024. yang di ikuti oleh Divisi Pemasyarakatan dan Peserta yang berjumlah 10 Orang Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan yang berasal dari 5 UPT yang ada di Wilayah Gorontalo.	-
	Juni	5. Melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan kepada UPT terkait Pelaksanaan tugas Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) yang ada di UPT dalam hal ini pelaksanaan litmas oleh PPK.	Menggunakan anggaran Monitoring dan Evaluasi sebesar Rp. 5.620.600

2. Rencana Aksi 2 : Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan

No	Bulan	Kegiatan Yang dilaksanakan	Anggaran
1.	Januari	1. Menyusun SK Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Gorontalo Tahun 2024.	-
2.	Februari s.d Maret	1. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas inputan data Tahanan, Anak, dan Warga Binaan pada Aplikasi SDP UPT Lapas/LPKA/Bapas; 2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pertukaran data/dokumen dan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi SPPT-TI pada Aplikasi SDP UPT Lapas/LPKA; 3. Melaporkan capaian dan evaluasi SPPT-TI setiap bulan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya melalui link pada aplikasi My Cloud;	Menggunakan anggaran Monitoring dan Evaluasi sebesar Rp. 5.620.600-
	April s.d Juni	1. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas inputan data Tahanan, Anak, dan Warga Binaan pada Aplikasi SDP UPT Lapas/LPKA/Bapas; 2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pertukaran data/dokumen dan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi SPPT-TI pada Aplikasi SDP UPT Lapas/LPKA; 4. Melaporkan capaian dan evaluasi SPPT-TI setiap bulan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya melalui link pada aplikasi My Cloud;	Menggunakan anggaran Monitoring dan Evaluasi sebesar Rp. 8.663.300-

3. Rencana Aksi 3 : Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk Lapas Produktif melalui *E-Katalog*.

No	Bulan	Kegiatan Yang dilaksanakan	Anggaran
1.	Januari	1. Rapat bersama Kepala UPT Pemasarakatan (Lapas) wilayah	-

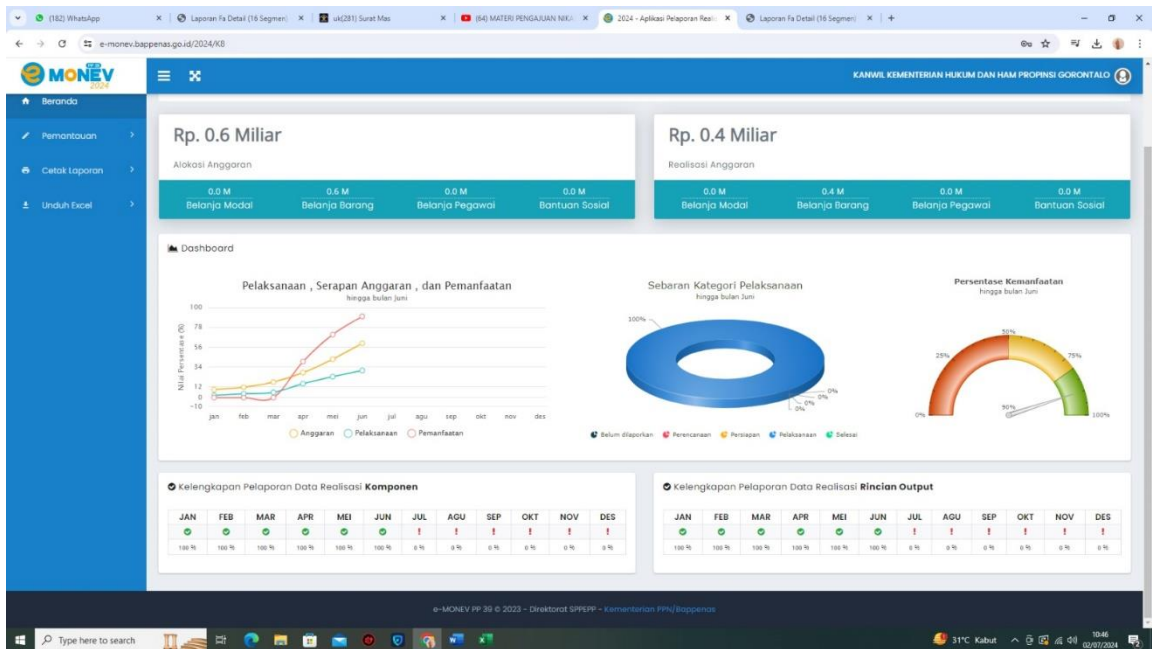
		<p>Gorontalo untuk membahas Rencana Aksi tahun 2024 tentang pemetaan Lapas Produksi wilayah Gorontalo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Divisi Pemasarakatan telah membuat asesmen dalam penilaian kesiapan Lapas wilayah Gorontalo dalam penetapan Lapas. 3. Asesmen tersebut di analisis untuk melakukan pemetaan terhadap kesiapan Lapas wilayah Gorontalo untuk ditetapkan sebagai Lapas Produksi tahun 2024. 4. Lapas wilayah Gorontalo menyampaikan daftar Inventaris produk hasil karya warga binaan. 5. Menyampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-08.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Pada Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta Pelaksanaan Pemasaran Produk Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan Produktif Melalui E- Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dijadikan sebagai pedoman/panduan dalam persiapan Lapas Produksi khusus diwilayah Gorontalo. 	
2.	Februari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Rapat Internal yang di pimpin oleh Kepala Divisi Pemasarakatan untuk memetakan Lapas yang berpotensi menjadi Lapas Produktif melalui hasil asesmen dan inventaris produk yang di kirimkan oleh UPT Lapas. 2. Menyampaikan Laporan terkait dengan Penetapan Lapas Produksi diwilayah Gorontalo pada bulan maret paling lambat tanggal 10 melalui link pada aplikasi <i>My Cloud</i>. 	-
3.	Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan Koperasi yang telah berbadan Hukum yaitu Koperasi Lapas Kelas IIA Gorontalo pada E-katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM dengan mengikuti prosedur/pedoman yang disampaikan 	Menggunakan anggaran Monitoring dan Evaluasi sebesar Rp. 5.620.600-

		<p>oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.</p> <p>2. Divisi Pemasyarakatan Gorontalo melaksanakan pendampingan terhadap jajaran Lapas Kelas IIA Gorontalo dalam proses pendaftaran pada <i>E-Katalog</i> sektoral Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p>3. Melaksanakan pendampingan oleh wilayah atas kegiatan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Kota Gorontalo untuk pembaruan NIB Koperasi Lapas Kelas IIA Gorontalo.</p> <p>4. Melakukan monitoring terhadap proses pendaftaran Koperasi Lapas Kelas IIB Boalemo untuk mendapatkan izin / badan hukum dari instansi terkait.</p>	
	April	<p>1. Divisi Pemasyarakatan Gorontalo melaksanakan pendampingan terhadap jajaran Lapas Kelas IIA Gorontalo dalam proses pendaftaran pada e-katalog LKPP sektoral Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p>2. Melakukan monitoring terhadap proses pendaftaran Koperasi Lapas Kelas IIB Boalemo untuk mendapatkan izin / badan hukum dari instansi terkait.</p> <p>3. Melakukan monitoring terhadap pendaftaran Koperasi Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo untuk mendapatkan izin / badan hukum dari instansi terkait.</p>	Menggunakan anggaran Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan, dan Informasi sebesar Rp. 2,053,000
	Mei	<p>1. Divisi Pemasyarakatan Gorontalo terus melakukan monitoring pelaksanaan penjualan dan pembelian melalui e-katalog Lapas Kelas IIA Gorontalo.</p> <p>2. Melakukan monitoring terhadap proses pendaftaran Koperasi Lapas Kelas IIB Boalemo untuk mendapatkan izin / badan hukum dari instansi terkait.</p> <p>3. Melakukan monitoring terhadap pendaftaran Koperasi Lapas Perempuan Kelas III</p>	Menggunakan anggaran Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan, dan Informasi sebesar Rp. 4,973,000-

		Gorontalo untuk mendapatkan izin / badan hukum dari instansi terkait.	
	Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Lapas Kelas IIB Boalemo dilaksanakan pada Selasa, 4 Juni 2024 s.d Rabu, 5 Juni 2024. 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Lapas Kelas IIB Pohuwato dilaksanakan pada Senin, 10 Juni 2024 s.d Selasa, 11 Juni 2024. 3. Menyelenggarakan Sosialisasi Teknis Pemasaryakatan tahun 2024 dengan mengambil tema Optimalisasi Program Kemandirian Pada Lapas Produksi dalam Pemasaran dan Pembelian Melalui Ekatalog Sektoral Kemenkumham”. 	<p>Menggunakan anggaran Monitoring dan evaluasi sebesar Rp. 9.840.000 dan sosialisasi teknis pemsaryakatan sebesar Rp. 14.230.000</p>

3. E- Monev Bappenas

Berdasarkan pemantauan pada aplikasi e-monev Bappenas tanggal 5 juli 2024:



Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Divisi Pemasaryakatan pada Aplikasi E-Monev Bappenas dapat terlihat bahwa telah menginput realisasi fisik dan realisasi anggaran per komponen, per indikator kinerja kegiatan (rincian output satker), dan per rincian output renja setiap bulannya (telah diinput 100% sampai dengan Tahun 2024).



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai didalam sebuah organisasi, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa didalamnya memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo telah menyusun LKjIP Tahun 2023 dengan menyajikan seluruh capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan capaian kinerja anggaran yang dilaksanakan selama Tahun 2024. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo didalamnya terdapat 7 UPT Pemasarakatan realisasi anggaran Divisi Pemasarakatan sebesar 100 % dari Pagu Belanja sejumlah Rp. 609,616,000,- (Enam ratus sembilan juta enam ratus enam belas ribu rupiah) hingga 30 Juni telah berhasil merealisasikan sejumlah Rp. 359,025.694- (Tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat) atau sebesar 60.27 % Capaian Perjanjian Kinerja dari Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah sebesar 3.87 Indeks dari target 3.6 Indeks

B. Saran

Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo memiliki strategi – strategi pencapaian kinerja untuk meningkatkan kinerja dalam organisasi, antara lain :

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo seperti meningkatkan kemampuan teknis di jajaran kantor wilayah dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja agar mewujudkan pemerintahan yang akuntabel;
- b. Diperlukan adanya komitmen dan dukungan dari seluruh pihak untuk mencapai setiap target pada indikator kinerja dengan efektif dan efisien;
- c. Mengevaluasi kembali terkait dengan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, maupun dari capaian kinerja anggaran secara berkala;
- d. Selalu menerapkan core values ASN yaitu Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) kepada

seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo secara masif.

Gorontalo, 30 Juni 2024
Kepala Divisi Pemasyarakatan,



Endang Lintang Hardiman SH.,MH
NIP. 196706201993031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
4. Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI